



**NOTA PENJELASAN**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MENGENAI**  
**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. RANCANGAN AWAL RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2011-2015**
- 2. BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN  
RAWAN BENCANA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 4 FEBRUARI 2011**

**NOTA PENJELASAN**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**M E N G E N A I**  
**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**T E N T A N G**

- 1. RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2015.**
- 2. BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**

**TANGGAL : 4 FEBRUARI 2011**

---

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/Biro Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri bersama rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015
2. Bangunan Gedung Pada kawasan Rawan Bencana.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah mengagendakan pembahasan 2 ( dua ) Rancangan Peraturan Daerah yang kami

ajukan. Dan sesuai dengan jadwal yang disepakati, maka pada rapat paripurna hari ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang latar belakang dan pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini sekaligus landasan yuridisnya.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan uraian/penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

**1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015**

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari rangkaian proses Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, memperhatikan rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, sebagai pentahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 telah melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penjabaran visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur kedalam tujuan, sasaran, agenda, prioritas, strategi, arah kebijakan, indikasi program prioritas, dan

indicator kinerja daerah, yang didasarkan pada data potensi daerah dan analisis isu-isu strategis, menjadi perumusan Rancangan Awal RPJMD 2011-2015.

- 2) Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJMD 2011 – 2015, dengan melibatkan seluruh SKPD Provinsi dan Instansi Vertikal di Sumatera Barat, pada tanggal 20-24 September 2010. Pada FGD ini dibahas kebijakan dan program kerja berdasarkan agenda dan prioritas pembangunan daerah disertai dengan target tahunan yang hendak dicapai.
- 3) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD pada tanggal 9-11 November 2010 dengan melibatkan Ketua dan Ketua Komisi DPRD Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, seluruh SKPD Provinsi, seluruh Instansi Vertikal di Sumatera Barat, Akademisi/Perguruan Tinggi, LSM/Organisasi Massa, Tokoh Masyarakat, Keterwakilan Perempuan, Unsur Pengusaha/Investor dan Nara Sumber baik dari Daerah maupun dari Pusat.
- 4) Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dengan mengakomodir hasil-hasil FGD dan Musrenbang. Pada tahap ini telah disepakati program-program strategis pembangunan Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dengan stakeholder terkait.
- 5) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada hari ini.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Penyusunan RPJMD ini selain mengacu kepada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2010-2014, Rancangan RTRW 2009-2029, juga bertitik tolak dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama RPJMD sebelumnya. Pembangunan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang, namun masih banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana lima tahun ke depan.

Dari aspek kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. Sampai kondisi tahun 2009 terlihat hasil capaian kinerja peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana beribadah dari tahun 2006 sebanyak 11.876 unit rumah ibadah menjadi 12.120 unit pada tahun 2009; dan 267 pesantren

tahun 2006 menjadi 325 pesantren pada tahun 2009. Sementara pengembangan nilai-nilai kebudayaan di daerah Sumatera Barat juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga seni dan budaya terutama budaya tradisional. Namun permasalahan yang ada adalah masih belum selarasnya tingkah laku masyarakat dengan kaedah dan norma yang terdapat dalam ajaran agama, adat dan budaya Minangkabau. Akibatnya upaya-upaya pembangunan yang telah direncanakan belum dapat diraih manfaatnya secara maksimal untuk peningkatan proses pembangunan daerah dan penciptaan keharmonisan dalam masyarakat.

Dari aspek Sumberdaya Manusia khususnya pendidikan, telah terlihat peningkatan untuk pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A sebesar 97,61% pada tahun 2006 menjadi 99,82 % pada tahun 2009, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 70,62 tahun 2006 menjadi 78.56 % tahun 2009 dan tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dari 49,13 % tahun 2006 menjadi 62,13 % pada tahun 2009. Namun kualitas sumberdaya manusia ini masih perlu ditingkatkan terutama untuk pemerataan pendidikan ditingkat SMA dan kualitas pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja.

Capaian kinerja jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan yang diperlihatkan dengan indikator angka harapan hidup dari 68,60 tahun pada tahun 2006 menjadi 70,40 tahun pada tahun 2009, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dari 36,0 turun menjadi 26,0 kelahiran hidup pada tahun 2009, angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran hidup dari 230 turun menjadi 208. Untuk indikator prevalensi gizi kurang pada anak balita juga memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan dari kondisi tahun 2006 sebesar 12,90% berkurang menjadi 10,50% pada tahun 2009. Namun untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015, perlu peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, dengan menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu serta mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan secara umum diwujudkan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, penataan kelembagaan melalui peraturan daerah, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan strata pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk mewujudkan transparansi pemerintahan telah ditata Pola Rekrutmen pegawai dalam 3 tahun terakhir yang lebih objektif, penataan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta kompetensi jabatan,

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, standar rekrutmen, promosi, mutasi aparatur, pengisian pakta integritas dan laporan harta kekayaan pejabat negara, disamping peningkatan supremasi hukum yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakkan hukum baik oleh lembaga penegak hukum maupun instansi lainnya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik Pemerintah Provinsi telah merintis rencana pelayanan satu pintu, penetapan SPM serta pembangunan e-Government untuk pelayanan informasi dan tender elektronik. Namun pelaksanaan prioritas pembangunan bidang pemerintahan masih perlu ditingkatkan, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi; transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, kompetensi sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan, jenis dan sifat pekerjaan serta peningkatan pelaksanaan koordinasi.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Dalam lima tahun terakhir struktur perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2005, sektor pertanian menyumbang terhadap pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 25,01%, dan sejak tahun 2006 kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga sampai tahun 2008 mencapai sebesar 24.10%. Penurunan kontribusi sektor pertanian diiringi dengan kenaikan sektor perdagangan hotel dan restoran serta industri pengolahan. Pada tahun 2005, sektor perdagangan hotel dan restoran menyumbang sebesar 18,20% dan industri pengolahan sebesar 13,06%, kontribusi sektor perdagangan terus meningkat menjadi 18,46% tahun 2009, dan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi 12,75%.

Hal ini mengindikasikan bahwa selama 2006-2009 telah terjadi perubahan struktur perekonomian Sumatera Barat secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, dan industri pengolahan.

Melemahnya perekonomian Sumatera Barat pasca krisis finansial global dan pasca bencana gempa bumi tahun 2009, akibat dari lemahnya struktur perekonomian ini. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, diperlukan arahan pembangunan yang dapat menangkap nilai surplus

ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya ekonomi sendiri, melalui pengembangan sektor pertanian ke arah agroindustri dan agribisnis yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dan industrialisasi pertanian. Untuk mengembangkan sistem produksi pertanian dan industri yang memiliki pangsa pasar yang besar di dalam daerah sendiri dan inter wilayah, diperlukan pengembangan industri pertanian yang tangguh dan efisien, yang memberikan insentif yang besar bagi petani produsen komoditi ekspor dan komoditi unggulan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada periode 2001-2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,67% per tahun dan pada periode 2006-2009 mencapai 5,51%. Sejak tahun 2006 Sumatera Barat telah mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6% dan pada tahun 2008 merupakan puncak dari pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dicapai provinsi Sumatera Barat yakni 6,37%. Setelah itu, imbasan krisis finansial global dan gempa bumi September 2009, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menurun sampai mencapai 4,16%,.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mulai membaik diestimasi sebesar 5,91 % yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama tahun 2010 ini diakibatkan oleh meningkatnya aktifitas ekonomi seiring dengan menggeliatnya perekonomian setelah gempa 30 September 2009 yang lalu. Seperti kontribusi sektor Bangunan sebesar 13,94 %, disebabkan meningkatnya pembangunan fisik bangunan pemerintah dan non pemerintah pasca gempa 30 September 2009.

Untuk tingkat pengangguran pada tahun 2009 sebesar 7,9 % lebih rendah dibanding dengan nasional sebesar 8,14 %. Karakteristik pengangguran tersebut berumur relatif muda (15-19 tahun) dan pendidikan relatif tinggi (SLTA dan lebih tinggi). Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan masih terbatasnya kesempatan kerja yang ada.

Selain pengangguran, kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang belum sepenuhnya berhasil dapat diselesaikan oleh pemerintah, baik nasional maupun Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2009 sebesar 9,54 % atau lebih rendah dari nasional sebesar 14,15 % dan tahun 2010 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat 9,5 %, sedangkan nasional 13,33 %. Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan

lima tahun ke depan, perlu dilakukan intervensi langsung kepada keluarga miskin berbasis nagari dan kelurahan serta pemberdayaan usaha mikro.

Persoalan lainnya adalah peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA) yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Sejalan dengan hal tersebut telah disepakati pula oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas pada tahun 2020 mendatang. Peningkatan persaingan ini segera akan menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat serius dan bahkan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat sampai saat ini umumnya masih rendah yang terjadi sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi sehingga biaya produksi rata-rata masih relatif tinggi. Disamping itu penggunaan teknologi untuk kegiatan produksi yang belum maju sehingga kualitas produk yang dapat dihasil umumnya masih relatif rendah.

Pembangunan bidang infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan, diperlihatkan dengan terlaksananya peningkatan pemanfaatan sumberdaya air, peningkatan sarana prasarana transportasi, peningkatan prasarana perumahan dan permukiman serta pengembangan energi listrik, bahan bakar dan energi alternatif. Capaian makro peningkatan sumberdaya air terlihat dari peningkatan areal irigasi teknis 29,5% tahun 2006 menjadi 70,00% tahun 2009. Untuk capaian peningkatan sarana prasarana jalan diperlihatkan dengan rasio aksesibilitas daerah 0,62 km/km<sup>2</sup> tahun 2006 menjadi 0,64 km/km<sup>2</sup> tahun 2009, tingkat kemantapan kondisi jalan dan jembatan dari 68,50% tahun 2006 menjadi 83,32% tahun 2009, rasio elektrifikasi dari 58,7% dari tahun 2006 menjadi 64,93 % tahun 2009. Pembangunan prasarana perumahan dan permukiman di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan lingkungan siap bangun dari 24 Ha pada tahun 2006 menjadi 61 Ha pada tahun 2009, cakupan pelayanan air bersih dari 42% pada tahun 2006 menjadi 58,20% pada tahun 2009. Sementara cakupan daerah pelayanan listrik menunjukan peningkatan sebesar 88,94% dari tahun 2006 menjadi 89,30% pada tahun 2009 serta rasio elektrifikasi dari 58,7% tahun 2006 menjadi 64,93% pada tahun 2009. Namun kondisi prasarana dan sarana, terutama berkaitan dengan sektor perhubungan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ternyata juga belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya bencana alam (longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami). Akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dan pembangunan daerah umumnya mengalami kendala yang cukup besar sehingga peningkatan



kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah belum dapat terwujud sebagaimana diharapkan.

Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Sumatera Barat adalah bahwa daerah ini sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan ancaman tsunami. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan yang paling serius akibatnya adalah gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, dengan menelan korban sebanyak  $\pm$  1,200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Akibat gempa tersebut sangat terasa dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah yang mengakibatkan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Dengan mencermati kondisi saat ini dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka visi pembangunan Sumatera Barat lima tahun ke depan adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**.

Masyarakat *Madani* yang dimaksudkan adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis, serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

*Adil* yang dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran.

*Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi.

*Bermartabat* dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dimana hak azazi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari negara.

Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi sebagai penjabarannya yaitu :

1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas

tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2011-2015 adalah :

1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

2. Tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government)
3. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata, dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat
5. Tercapainya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan serta memperhatikan agenda pembangunan nasional, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 ditetapkan 5 (lima) agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2011-2015 yaitu :

#### **1. Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah**

Penerapan ajaran agama dan budaya daerah merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bemuansa agama, peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan budaya minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat,

#### **2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Oleh karena peran pemerintah dalam pembangunan cukup dominan, maka percepatan proses pembangunan daerah berkaitan erat dengan tata-kelola pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan agenda penting dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah: peningkatan keterpaduan dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi,

perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik.

### **3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi dan penerapan dan pengembangan IPTEKS tepat guna serta perbaikan etos kerja masyarakat.

### **4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.

### **5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda perbaikan kualitas lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Fokus utama agenda ini adalah pada perbaikan kualitas Rencana Tata-Ruang Wilayah (RTRW), mewujudkan disiplin aparatur dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata-ruang tersebut serta terus meningkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, 5 (lima) agenda pembangunan ini dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang merupakan kumpulan langkah strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan.

**Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.** Prioritas pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Berkurangnya perbuatan maksiat.

**Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.** Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Dengan prioritas ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi aparatur, peningkatan penyediaan layanan satu pintu, penyederhanaan perizinan, pengadaan jasa layanan secara elektronik (*e-Government*), penurunan tingkat temuan audit BPK dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.** Prioritas peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra

pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Lahirnya wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga dan 12) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Dengan prioritas ini diharapkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan pemerataan pendidikan yang ditandai dengan APM SD/MI/SDLB/Paket A dari 99,85% tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015, APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 78,56% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2015, dan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dari 62,13% tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015.

**Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.** Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, 7) Meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Dengan prioritas ini diharapkan Umur Harapan Hidup dari 70,40 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,56 tahun pada tahun 2015, Angka Kematian Ibu melahirkan dari 208 per 100.000 KH pada tahun 2009 menjadi 181,60 per 100.000 KH pada tahun 2015, Angka Kematian Bayi pada tahun 2009 dari 26,00 per 1000 KH menjadi 14,00 per 1000 KH pada tahun 2015, Angka Gizi Kurang (BB/TB) pada tahun 2009 dari 10,5% menjadi 6,6% tahun 2015.

**Prioritas 5: Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.** Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan) yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai



propinsi agribisnis dengan petani yang sejahtera, 4) Berkembangnya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip one village one product.

Dengan prioritas ini diharapkan berkembangnya kawasan sentra produksi (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) menjadi 111 kawasan pada tahun 2015, meningkatnya jumlah KK petani yang memiliki sapi dari 180.236 KK tahun 2010 menjadi 250.000 KK tahun 2015, meningkatnya luas lahan tanaman kakao dari 82.000 Ha tahun 2010 menjadi 130.000 Ha tahun 2015, meningkatnya produksi daging dari 51.996 ton tahun 2009 menjadi 88.922 ton tahun 2015, meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 84.864 ton tahun 2009 menjadi 386.700 ton tahun 2015, perikanan tangkap 199.895 ton tahun 2009 menjadi 261.900 ton pada tahun 2015, peningkatan produksi jagung dari 404.816 ton tahun 2009 menjadi 629.618 ton pada tahun 2015, peningkatan produksi padi dari 2.104.469 ton tahun 2009 menjadi 2.884.827 ton tahun 2015.

**Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan.** Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri.

Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya jumlah pelaku usaha industri pengolahan yang berkualitas sebanyak 30 perusahaan tahun 2015, meningkatnya nilai investasi pada industri pengolahan sebesar 29,93% dari keseluruhan investasi yang ada tahun 2015, meningkatnya nilai produksi industri pengolahan dari 5,63% tahun 2011 menjadi 9,39% tahun 2015, meningkatnya jumlah kelembagaan koperasi yang berkualitas sebanyak 60 unit tahun 2015.

**Prioritas 7: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.** Prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs-situs budaya Minangkabau



yang sudah ada menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan parawisata alam dan budaya ini diharapkan: 1) Berkembang objek-objek wisata alam yang potensial, 2) Berkembangnya objek-objek wisata budaya yang sudah ada pada setiap daerah, 3) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya.

Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pada 10 destinasi pariwisata utama yaitu kawasan Gunung Padang, Mandeh, Lembah Harau, Ulakan dan Rumah Tabuik, Maninjau, Surfing Mentawai, Tambang Sawahlunto, Danau Kembar, Istano Pagaruyung dan Panorama Baru. Selain itu juga diharapkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sebesar 50% pada tahun 2015, dan berkembangnya produk wisata budaya Minangkabau pada tahun 2015.

**Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.**

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 3) Perluasan lapangan kerja, 4) Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, 5) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro.

Diharapkan pada prioritas ini terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 6,95% tahun 2010 menjadi 5,65% tahun 2015 dan penurunan kemiskinan dari 9,5% tahun 2010 menjadi 7,5% pada tahun 2015.

**Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.** Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar kota dan desa, 3) Meningkatnya akses jalan terhadap destinasi wisata, 4) Tersedianya akses jalan evakuasi penanggulangan bencana, 5) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 6) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 7) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Dengan prioritas ini diharapkan tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat dari 83,32% tahun 2009 menjadi 87,52% pada tahun 2015, luas persentase sawah

irigasi teknis meningkat dari 31,1% pada tahun 2009 menjadi 42,5% pada tahun 2015, ratio elektrifikasi meningkat dari 64,93 pada tahun 2009 menjadi 78,43 di tahun 2015.

**Prioritas 10: Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.** Prioritas Penanggulangan Bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) Terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) Pengurangan resiko bencana alam, 5) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi, 6) Terwujud konservasi sumberdaya alam, 7) Penekanan laju deforestasi, 8) Pengendalian kerusakan lingkungan, 9) Penurunan pencemaran lingkungan, 10) Terpeliharanya kearifan lokal terhadap lingkungan.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Beberapa program terobosan dalam rangka merealisasikan 10 prioritas pembangunan tersebut antara lain adalah : gerakan terpadu pengamalan agama dan adat berdasarkan falsafah ABS SBK, gerakan terpadu reformasi birokrasi, gerakan terpadu pengembangan sumberdaya manusia, gerakan terpadu pensejahteraan petani, gerakan terpadu pengembangan UMKMK, gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, program bantuan satu sapi satu petani, pengembangan kakao, jagung, dan tuna, program subsidi siswa miskin SLTA dan program pendidikan berkarakter. Disamping itu juga direncanakan pengembangan infrastruktur strategis seperti jaringan jalan kereta api Duku – BIM, shortcut jalan kereta api Padang – Solok, jalan dua jalur Padang – Payakumbuh, jalan Sicincin – Malalak – Ngarai Sianok, Mesjid Raya, Balairung, jalan dua jalur tepi pantai menuju BIM, Jalan alternatif Sitinjau Laut, pembangunan jalan dua jalur Padang – By Pass, pembangunan jalan evakuasi dan Escape Building, Minang Expo Centre, Embarkasi Haji, Hotel Transit Bandara, Pembangkit Listrik tenaga Hidro, Geo Termal, Blok Migas Mentawai I dan II, Pengendalian banjir Batang Anai – Kandis

(Padang Flood control tahap III), Irigasi Batang Anai II, Batang Palangki dan Batang Sinamar (Tanah Datar dan Sijunjung), pengembangan pelabuhan Teluk Bayur, pengembangan rest area kelok sembilan, Pengembangan kawasan industri Maritim (pantai Carocok Mandeh), Pengembangan kawasan Ekonomi Khusus (Padang Pariaman), dan Centra wisata Lembah Anai (Hotel/resort,cable car, pengembangan ecotourism) .

Pelaksanakan prioritas pembangunan di atas, perlu didukung baik oleh dana APBD maupun APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kita harus selalu konsisten terhadap keterkaitan antara penganggaran dengan perencanaan, dimana setiap pengeluaran harus sesuai dengan yang direncanakan, sehingga anggaran yang relatif terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

## **2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada kawasan Rawan Bencana.**

Rancangan Peraturan Daerah ini sangat penting dan strategis dalam upaya memberikan landasan kebijakan yang kuat terhadap seluruh kebijakan yang kita jalankan terutama dalam penyelenggaraan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana. Untuk itu dalam rapat paripurna hari ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang pokok-pokok pikiran serta latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada kawasan rawan Bencana, sekaligus dengan landasan yuridisnya.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia, Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal , seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, oleh karena itu pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Apabila dilihat dari tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zona gempa, lokasi ketinggian dan/atau kepemilikan, bangunan gedung mempunyai klasifikasi fungsi. Bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus tentu tidak sama cara dan/atau persyaratan secara administratif maupun persyaratan teknis bangunan yang diperlukan oleh setiap orang dan/atau badan hukum membuat perencanaan dan pelaksanaan dari konstruksi bangunan.

Dilihat dari segi geografis dan topografis, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah laut dan daratan merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, letusan gunung merapi, tanah longsor serta bencana non alam akibat faktor manusia seperti kebakaran dan runtuhnya konstruksi sebagai kegagalan konstruksi/bangunan. Untuk itu dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk bangunan gedung harus direncanakan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan serta dampak lainnya dari penyelenggaraan dan pelaksanaan bangunan gedung. Setiap orang/badan hukum yang akan membuat bangunan gedung harus membuat perencanaan dan pelaksanaan dari konstruksi bangunan , sehingg terciptanya bangunan gedung yang andal, seimbang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Kalau kita lihat fakta dilapangan, masih banyak ditemui bangunan gedung baik dilihat dari fungsi maupun peruntukan bangunan yang tidak mempunyai kualifikasi dan persyaratan administratif dan teknis bangunan. Potensi demikian dapat dibuktikan dengan besarnya potensi terhadap kerusakan bangunan apabila terjadi bencana alam, ataupun bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukan, selain itu pelaksanaan bangunan gedung tidak berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal , kegiatan keagamaan , kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dearah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung yang merupakan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungannya. Mengingat wilayah provinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya mitigasi bencana mengurangi resiko pada kawasan bencana dilakukan dengan menerapkan ketentuan pelaksanaan tata ruang, tata pengaturan pembangunan infrastruktur serta tata bangunan. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang disusun berbasis mitigasi bencana, ketentuan ini menjadi jiwa dari penataan ruang nasional, penataan provinsi dan penataan ruang kabupaten/kota. Sehingga dibidang bangunan gedung menjadi acuan untuk pengaturan bangunan gedung termasuk terhadap bencana guna melindungi masyarakat.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada kawasan rawan Bencana ini adalah merupakan payung hukum bagi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami memandang perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari 10 BAB, 49 Pasal yang memuat materi sebagai berikut:

- I. KETENTUAN UMUM
- II. ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
- III. TANGGUNG JAWAB
- IV. ARAHAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
- V. ARAHAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG PADA TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA
- VI. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
- VII. PEMBERDAYAAN

VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

IX. KETENTUAN PERALIHAN

X. KETENTUAN PENUTUP

Untuk menciptakan adanya tertib administratif dan tertib hukum serta adanya pengintegrasian dan perencanaan yang lebih baik kedepan, maka diperlukan adanya pengaturan bangunan gedung pada daerah kawasan bencana dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan adanya pengaturan mengenai bangunan gedung pada kawasan rawan bencana, diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat jasmaniah dan rohani. Untuk itu dituntut peran aktif dari masyarakat untuk dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kenyamanan dan keselamatan pada bangunan gedung.


**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.**

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 serta Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana dan, kami berharap bahwa dengan kerjasama yang baik tugas besar nan mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha kita bersama.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GOVERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO